

PERKEMBANGAN DAN PROBLEMATIKA KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) DI INDONESIA DARI MASA KE MASA

Nurhasanah

Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Corresponding Author E-mail: nurhasanah81smp9@gmail.com

Arief Sukino

Institut Agama Islam Negeri Pontianak
E-mail: ariefsukino@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research was driven by changes in the national education curriculum in Indonesia which has undergone several changes and modifications. Along with the growth and development of science and technology in the realm of education, it requires our educational curriculum to adapt to current development. The curriculum of Islamic religious education or PAI also experiences development and keeps up with the times. This study seeks to reveal the development of the existing Islamic religious education curriculum in Indonesia and the problems faced in each era in which the curriculum was implemented. This research method is descriptive with a qualitative approach. Based on this research, it is revealed that the development of the Islamic religious education curriculum in Indonesia is influenced by changes in the national curriculum and the dynamics that occur in society. The dynamics that occur in the PAI curriculum include: increasing the portion from 25% to 30% in 1975, emphasis on aspects of interfaith tolerance in the 2004 KBK curriculum, PAI occupies top priority over other subjects in the 2013 curriculum. However, the challenge is the emergence of various religious understandings, the lack of readiness of teaching staff, facilities, laboratories, and information technology facilities. The Independent Curriculum provides an opportunity for educators to design lesson plans because this curriculum gives educators the flexibility to apply appropriate methods. However, the challenge is that it requires high creativity from educators.

Key Words: development, curriculum, Islamic religious education

ABSTRAK

Penelitian ini didorong oleh perubahan kurikulum pendidikan nasional di Indonesia yang sudah mengalami perubahan dan modifikasi beberapa kali. Seiring pertumbuhan dan perkembangan IPTEK di dunia pendidikan, mengharuskan kurikulum pendidikan kita beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Kurikulum pendidikan agama Islam juga mengalami perkembangan dan mengikuti zaman. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia dan problematika yang dihadapi pada era masing-masing di

mana kurikulum diterapkan. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diungkapkan bahwa perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan kurikulum nasional dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Adapun dinamika yang terjadi dalam kurikulum PAI antara lain: penambahan porsi dari 25% menjadi 30% pada tahun 1975, penekanan pada aspek toleransi antarumat beragama pada kurikulum KBK tahun 2004, PAI menempati prioritas utama daripada mata pelajaran lainnya pada Kurikulum 2013. Namun, tantangannya adalah munculnya paham-paham keagamaan yang beragam, kurangnya kesiapan dari tenaga pendidik, sarana, laboratorium, dan fasilitas teknologi informasi. Adapun Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mendesain rencana pembelajaran karena kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk menerapkan metode yang tepat. Namun, tantangannya adalah diperlukan kreatifitas yang tinggi dari pendidik.

Kata Kunci: Perkembangan, kurikulum, pendidikan agama Islam

PENDAHULUAN

Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Upaya perbaikan demi perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah terkait hal tersebut (Ritonga, 2018). Faktanya, kurikulum pendidikan di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perbaikan. Ini dapat dilihat pada zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, pascakemerdekaan, kurikulum pada masa orde lama, kurikulum pada masa orde baru, serta kurikulum di masa reformasi hingga saat ini. Saat ini, sudah dikembangkan kurikulum baru yang biasa kita sebut dengan kurikulum merdeka.

Seiring perkembangan zaman, kurikulum mengalami perkembangan yang signifikan. Keadaan yang semakin berkembang, serta teknologi yang semakin modern, maka kurikulum disusun mengacu pada perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang sangat signifikan maka kurikulum pun mengalami perubahan dengan bertahap, untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka usaha untuk melakukan transformasi kurikulum yang dapat menjawab perkembangan zaman seperti masa kini (Muhammedi, 2016).

Dalam lika-likunya, perkembangan kurikulum di Indonesia membuat para pemikir pendidikan berusaha untuk menciptakan kurikulum yang dapat menjawab tantangan zaman, tidak terkecuali dengan kurikulum pendidikan agama Islam (Akhyar & Erihadiana, 2021). Kurikulum pendidikan agama Islam memegang posisi yang amat penting dalam upaya mengarahkan peserta didik agar memiliki akhlak yang mulia. Kurikulum pendidikan agama Islam juga harus didesain agar dapat menjawab tantangan pendidikan saat ini (Azizah, 2022). Oleh sebab itu, proses perancangan kurikulum dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesinambungan antara satu dengan yang lainnya.

Kurikulum sebagai sebuah rencana yang mencakup hasil akhir dari sebuah pendidikan diupayakan untuk menciptakan serta mencetak lulusan yang berakhlakul karimah sesuai dengan tujuan pendidikan kita saat ini. Yang

mana kurikulum juga diupayakan harus menjadi parameter lulusan yang akan diciptakan. Kompetensi lulusan yang diharapkan dapat selaras dengan ilmu yang dimiliki oleh lulusan.

Untuk mencapai kurikulum yang kompatibel tidaklah mudah. Kondisi pendidikan Indonesia saat ini yang terus mengalami perkembangan membuat kurikulum dituntut harus mampu menyesuaikan. Perubahan sudah berkali-kali dilakukan oleh para tokoh pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, banyak problem yang dialami dalam perkembangan kurikulum di Indonesia seperti menurunnya prestasi peserta didik dan tuntutan sarana dan prasarana (Setiawati, 2022). Lalu, bagaimana dampak perkembangan kurikulum pendidikan nasional terhadap kurikulum pendidikan agama Islam? Melalui pertanyaan ini lah peneliti tertarik untuk membahas bagaimana perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia serta problematika dalam perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian ini adalah karena peneliti melihat sifat dari masalah yang diteliti dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada saat ini (Sugiyono, 2012). Peneliti juga berkeyakinan bahwa dengan pendekatan alamiah, pendekatan ini bisa lebih kaya. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Sumber datanya berupa kata-kata dan informasi yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan agama Islam yang diterapkan di Indonesia dari sejak masa penjajahan hingga era reformasi. Datanya bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel online yang otoritatif (Abubakar, 2021).

Data selanjutnya dianalisis secara deskriptif berupa perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam dari masa ke masa di Indonesia. Penelitian dengan pendekatan analisis secara deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan (Creswell, 2014). Sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti, dengan melakukan analisis terhadap kurikulum yang ada dapat membuat peneliti lebih mudah melakukan penganalisisan data. Selanjutnya, dikemukakan pula problem yang terjadi dalam penerapan masing-masing kurikulum.

PEMBAHASAN

A. Kurikulum: Tujuan dan Perkembangannya di Indonesia

Kurikulum adalah program rancangan belajar mengajar yang dipedomani oleh pendidik dan peserta didik. Dari peran yang sangat strategis dan fundamental dalam rangka untuk berjalannya pendidikan yang baik maka kurikulum memiliki peran dalam pencapaian tujuan. Hal ini mengingat baik tidaknya suatu kurikulum akan teramati melalui proses dan hasil capaian yang sudah dilaksanakan.

Kurikulum berasal dari bahasa Inggris yakni *curriculum* yang berarti rencana pelajaran yang di mana *curriculum* berasal dari bahasa latin *currere* yang memiliki banyak arti seperti berlari cepat, maju dengan cepat, menjalani, dan berusaha (Bahri, 2011). Pengertian kurikulum sebagai rencana pembelajaran berarti bahwa kurikulum ialah sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa yang memuat rencana untuk peserta didik (Iman, 2018). Sedangkan menurut (Kerr J. F., 1968), kurikulum adalah sebuah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan individu dan berkelompok baik di luar maupun di dalam sekolah. Kurikulum juga memuat mata pelajaran yang dirancang untuk mencapai sebuah visi dan misi. Kurikulum ialah dokumen tertulis yang mengandung isi mata pelajaran yang diajar kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari (George A. Beaucham, 1976).

Tujuan kurikulum tiap satuan pendidikan harus mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional. Dalam skala yang lebih luas, kurikulum merupakan suatu alat pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan adalah sesuatu yang harus dicapai oleh peserta didik. Kurikulum menyediakan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk mengalami proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai target tujuan pendidikan nasional khususnya dan sumber daya manusia yang berkualitas umumnya. Tujuan ini dikategorikan sebagai tujuan umum kurikulum.

Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan 2022 (kurikulum merdeka). Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.

B. Perkembangan Kurikulum PAI di Indonesia

Salah satu tantangan kurikulum pendidikan Islam adalah rendahnya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai (Sukino, 2016). Dalam sejarahnya, pendidikan agama Islam sangat banyak dilakukan di pelantaran masjid dan pesantren-pesantren (Novrizal & Faujih, 2022). Dalam hal ini, peneliti menyajikan perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam dari masa ke masa yang beberapa kali mengalami perubahan dari segi konsep serta tujuannya di antaranya yaitu:

1. Kurikulum PAI pada masa Bung Karno PraKemerdekaan.

Pada masa prakemerdekaan, pendidikan selalu dan didominasi oleh sisa-sisa penjajahan dan kolonialisme. Sejarah tersebut tidak serta-merta hilang dari bumi Indonesia. Kolonialisme yang sudah menjamur di Indonesia sangat mengakar dari sudut mana pun, tidak terkecuali pada sistem pendidikan di Indonesia. Hal tersebut juga berpengaruh pada pendidikan agama Islam di Indonesia, yang mana pendidikan di Indonesia sangat menjunjung tinggi pada kepentingan penjajahan yaitu pada kolonialisme Belanda dan Jepang.

Sisa-sisa penjajahan tersebut masih sangat melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sistem pendidikan salah satunya, sistem pendidikan yang masih sangat kental dengan gaya kolonialisme penjajahan membuat sistem pendidikan dan kurikulum pendidikan yang dalam hal ini kurikulum pendidikan agama Islam masih bermuara pada gaya pemikiran dan kepentingan kolonialisme Belanda tempo dulu. Yang mana misi utama Bangsa Eropa pada masa itu yaitu menyebarkan agama mereka. Oleh karena itu, pada abad ke-16 hingga ke-17. Bangsa Eropa menciptakan serta mendirikan lembaga pendidikan untuk menyebarkan agama mereka yaitu Kristen di bumi Nusantara (Muhaimin, 2007).

2. Kurikulum PAI Pada Masa Orde Lama (Soekarno)

Pada perkembangannya, kurikulum di era Orde lama mengalami perubahan. Yang mana kurikulum di masa itu di bagi menjadi 2 bagian kurikulum yang berbeda tahun. Di antaranya yaitu:

a. Kurikulum Orde Lama 1947

Kurikulum Orde Lama pada tahun 1947 ini dirancang pada tahun 1947 silam. Akan tetapi, dalam penerapannya mulai diberlakukan pada tahun 1950. Oleh karenanya, banyak para pendidik mengatakan bahwa berkembangnya kurikulum dimulai pada tahun 1950. Akan tetapi, pendidikan agama Islam muncul dan diatur pada SKB dua Menteri (Menteri PP&K dan Meteri Agama), yang mana dalam kurikulum tersebut masih sangat kuat dan dominasi sistem pendidikan kolonialisme Belanda dan Jepang tempo dulu. Oleh karena itu, kurikulum ini pada masanya masih sangat rapuh dan masih banyak mengadopsi sistem pendidikan Negara Belanda. Oleh sebab itu, yang mendominasi dari kurikulum tersebut yaitu gaya pendidikan kolonialisme Belanda (Dhaifi, 2017). Bukan hanya corak pendidikan Belanda saja yang ada di kurikulum tersebut, Negara Jepang juga menjadi salah satu negara yang memberikan pengaruh pada kurikulum Indonesia pascakemerdekaan.

b. Kurikulum 1952-1964

UPPP (Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran) Nomor 4 Tahun 1950 yang mengatur pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum dan selanjutnya diatur dalam SKB dua Menteri tahun 1951 yang menyatakan serta menegaskan bahwa di lembaga pendidikan formal wajib menyelenggarakan pendidikan agama paling sedikit 2 jam setiap minggu. Dalam hal ini, upaya DEPAG membentuk kurikulum agama di sekolah maupun di pesantren. Sebesar 25% pendidikan

agama harus didapatkan oleh para siswa dari seluruh mata pelajaran yang ada pada setiap minggunya (Tafsir, 2005). Pendidikan agama Islam yang diwajibkan 2 jam dalam satu minggu membuat pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah maupun madrasah mulai diminati banyak kalangan orangtua murid pada masa dahulu. Orientasi para orangtua tempo dulu yang ingin menyekolahkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama yang lebih harus menyekolahkan anaknya ke Pondok Pesantren maupun Madrasah. Akan tetapi, setelah muncul SKB dua Menteri pada tahun 1951 tersebut, membuat para orangtua cukup lega karena anaknya bisa mengenyam pendidikan agama di sekolah umum walaupun hanya 2 jam dalam satu minggu.

3. Kurikulum PAI pada masa Soeharto (Orde Baru)

Peralihan kepemimpinan Indonesia dari Soekarno ke Soeharto yang biasa dikenal dengan peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru berdampak pada seluruh tatanan bernegara di Indonesia pada masa itu, tidak terkecuali pada sistem pendidikan. Dampak yang dimunculkan akibat peralihan kekuasaan tersebut berimbas pada kurikulum yang ikut berganti. Berikut kami sajikan kurikulum yang diberlakukan pada masa Orde Baru di antaranya yaitu:

a. Kurikulum 1968

Kurikulum yang lahir pada tahun 1968 tersebut adalah satu kesatuan dari kurikulum 1964, yang mana kurikulum tersebut adalah penyempurna dari kurikulum 1964 yang telah dirancang 4 tahun sebelumnya. Kurikulum 1968 adalah salah satu integrasi kurikulum di era Orde Baru. Pendidikan agama pemberlakuannya masih mengacu pada kurikulum 1964. Kurikulum 1968 memberlakukan pendidikan agama masih sama dengan kurikulum sebelumnya yaitu sebanyak 2 jam dalam satu minggu (Dhaifi, 2017). Kurikulum ini mengintegrasikan antara pendidikan kurikulum sebelumnya dan menjadi penyempurnanya. Oleh karena itu, kurikulum ini menjadi *icon* Indonesia di masa itu.

b. Kurikulum Orde Baru tahun 1975

Kurikulum ini berorientasikan pada peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pendidikan, dalam hal ini pada kegiatan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Pada zaman ini lah muncul dan dikenalnya istilah satuan pembelajaran yang biasa kita kenal dengan satuan pembelajaran atau yang biasa juga dikenal dengan perencanaan pembelajaran di setiap pembahasan. Terbitnya SKB tiga menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri P&K. Selain itu, telah disusun pula kurikulum madrasah (Dhaifi, 2017). Kurikulum tersebut membuat lega para orangtua di antaranya yaitu porsi pendidikan agama naik yang semula 25% menjadi 30% yaitu naik 5% dari kebijakan sebelumnya, dan 70% untuk pendidikan umum. Pada masa itu, ijazah lulusan madrasah mulai diakui dan diperbolehkan perpindahan dari sekolah madrasah untuk mutasi ke sekolah umum lainnya (Kodir, 2015).

c. Kurikulum 1984 (Orde Baru)

Peran siswa dalam mengamati sesuatu menjadi ciri dari kurikulum ini, yang mana kurikulum ini adalah penyempurna kurikulum sebelumnya. Ciri dari kurikulum ini bukan hanya mengamati melainkan mengelompokkan, mendiskusikan, serta melaporkan adalah bagian dari ciri kurikulum yang lahir pada tahun 1984 ini. Kurikulum ini memunculkan model belajar yang bervariasi di antaranya yaitu Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), yang mana guru dalam model belajar ini hanya sebagai fasilitator sehingga yang kita lihat dalam model pembelajaran ini yaitu siswa yang aktif. Metode ceramah yang biasa digunakan oleh para guru sudah mulai tergerus jika menggunakan model-model pembelajaran ini.

Dalam kurikulum ini, pendidikan agama diberi porsi yang sama pada kurikulum sebelumnya. Akan tetapi, diperkuat dengan SKB 2 Menteri yang menegaskan bahwasannya lulusan dari madrasah boleh melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum. Hal ini membuat para orang tua tidak ragu lagi untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah. Di antara rumusan kurikulum 1984 adalah memuat hal-hal strategis, di antaranya: (1) Program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTs, dan MA) tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, baik dalam program inti maupun program pilihan. (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dan apa yang dipelajarinya. (3) Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk keperluan peningkatan proses dan hasil belajar serta pengelolaan program (Kemenag, 2022).

d. Kurikulum 1994 dan Suplemen 1999

Kurikulum ini tidak serta-merta lahir dengan begitu, kurikulum ini adalah sebuah hasil dari upaya memadukan kurikulum-kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Di antaranya yaitu kurikulum tahun 1975 serta kurikulum tahun 1984. Pada periode ini, telah muncul UU SISDIKNAS No. 02 tahun 1989 yang berisikan bahwa madrasah adalah Lembaga pendidikan yang bercorak Islami. Hal ini tidak lahir dengan begitu saja melainkan sudah dipersiapkan pada masa sebelumnya.

Pada tahun 1994, kebijakan mengenai kurikulum pendidikan agama juga diterapkan di setiap jenjang pendidikan yakni sebagai mata pelajaran wajib mulai jenjang SD hingga di Perguruan Tinggi. Pada tingkat SD, terdapat sembilan mata pelajaran, termasuk pendidikan agama. Pada jenjang SMP, struktur kurikulumnya juga sama, yakni pendidikan agama dimasukkan ke dalam kelompok program pendidikan umum. Begitu pula pada jenjang SMU, pendidikan agama masuk dalam kelompok program pengajaran umum bersama mata pelajaran PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, IPA (Biologi, Kimia, dan Fisika), IPS (Sosiologi, Geografi, dan Ekonomi) dan Pendidikan Seni. Bagi kurikulum pendidikan agama, Kurikulum 1994,

hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang ada tidak memengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter/muatan pendidikan keagamaan siswa. Hingga tahun 1998, pendidikan di Indonesia, masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989, dan kurikulum 1994. Jatuhnya rezim orde baru memberikan gagasan reformasi sekitar tahun 1998, yang salah satu agendanya adalah perubahan dan pembaruan di bidang pendidikan, sebagaimana yang menjadi tema kritik para pemerhati pendidikan dan diharapkan berbagai pihak (Kemenag RI, 2021).

4. Kurikulum PAI pada masa reformasi

Era reformasi yang mengedepankan keterbukaan dan transparansi, nyatanya telah berpengaruh pada dunia pendidikan nasional. Kurikulum di era reformasi telah mengalami beberapa perubahan, di antaranya:

a. Kurikulum KBK

Kurikulum KBK ini memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing, maju, sejahtera dalam wadah NKRI. Dalam kurikulum ini, proses belajar tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pemerintah kemudian menetapkan UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dengan ditetapkannya kurikulum 2004 ini, maka berimplikasi langsung dengan pelaksanaan pendidikan agama Islam, akhirnya madrasah menjadikan kompetensi sebagai basisnya (Idi, 2014).

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)/kurikulum 2006

Kurikulum ini memiliki kebijakan bahwa pemerintah pusat menetapkan standar dan kompetensi dasar sedangkan sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Penyelenggaraan Pendidikan agama Islam di madrasah/sekolah, dijabarkan dalam kurikulum agama yang dikeluarkan oleh KEMENAG, dan tepat pada bulan Mei 2008, Menteri Agama menandatangani PERMENAG No.2 Tahun 2008, menyangkut standar kompetensi lulusan dan standar isi PAI. Dalam hal ini, kurikulum madrasah tidak harus diubah dari KTSP ke K13, yang harus dilakukan yaitu pengembangan dengan pendekatan-pendekatan rasional, konstruktif dan dialogis (Sukino, 2017).

c. Kurikulum 2013

Kurikulum ini memiliki kebijakan untuk mewujudkan Pendidikan berkarakter, menciptakan Pendidikan berwawasan lokal, dan menciptakan Pendidikan yang ceria dan bersahabat. Kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik berat K13 adalah bertujuan agar peserta didik atau siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya (wawancara), bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang diperoleh atau diketahui setelah menerima materi pembelajaran. Model adaptasi madrasah yang dikembangkan dan dinamai Pendaimandor dalam mengarungi tantangan modernitas dan dinamika masyarakat yang rentan konflik dilakukan dengan cara:

Pertama, Konfigurasi Sumber Daya Manusia: Model Adaptasi Mutikultur. Kedua, Rekonstruksi Kurikulum Madrasah: Model Adaptasi yang Inklusif, Ketiga, Hidden Curriculum: Internalisasi Ideologi Multikultural (Sukino & Erwin, 2019). Pengembangan Madrasah harus mengutamakan kedua hal di antaranya yaitu: transformasi paradigma dan transformasi konsep menuju aksi (Sukino, 2016).

d. Kurikulum Merdeka

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (MendikbudRistek) Nadiem Makarim telah melakukan *launching* Kurikulum Merdeka tepatnya pada 11 Februari 2022. Sebelumnya, Kurikulum Merdeka ini dikenal sebagai Kurikulum Prototipe. Kurikulum ini sudah diujicoba di 2.500 sekolah penggerak. Kurikulum ini sudah mulai diberlakukan mulai tahun ajaran 2022/2023 di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Adapun inti dari Kurikulum Merdeka adalah pendidikan berpatokan pada esensi dari belajar di mana setiap anak memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Dengan kedua hal tersebut, maka tolok ukur yang diterapkan untuk menilai kedua anak yang memiliki minat berbeda pun tidak sama. Sehingga setiap anak tidak bisa dipaksakan untuk mempelajari sesuatu hal yang tidak disukainya. Tujuannya untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini.

C. Problematika Kurikulum PAI di Indonesia

Permasalahan kurikulum PAI yang pernah terjadi di Indonesia sebagai berikut:

1. Kurikulum 1947

Kurikulum ini tidak mengajarkan tentang pendidikan umum maupun Pendidikan Islam. Hanya saja kurikulum ini mengedepankan manusia yang cinta negara dan mempunyai kesadaran berbangsa.

2. Kurikulum 1952-1964

Kurikulum ini banyak mendapat tantangan dari kaum pendidik, karena mereka memandang lebih tepat menggunakan sistem Pendidikan Pancasila. Oleh karena itu, kurikulum ini tidak dapat digunakan lagi.

3. Kurikulum 1975

Kurikulum ini banyak dikritik karena guru sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran (Sudjana, 2011).

4. Kurikulum 1984

Banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA, yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas, lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar dan guru tidak lagi mengajar dengan metode ceramah, sehingga penolakan CBSA bermunculan.

5. Kurikulum 1994 dan suplemen 1999

Kritik tentang kurikulum ini bertebaran, lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga muatan lokal. Dengan kehadiran suplemen kurikulum 1999, membuat perubahan yaitu menambah sejumlah materi. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem

caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagisiswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak.

6. Kurikulum KBK

Dalam kurikulum ini membutuhkan banyak biaya, waktu, tenaga pendidik, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap di setiap sekolah karena kurikulum ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan berbasis kompetensi (Idi, 2014). Muatan PAI pada dasarnya sama dengan kurikulum sebelumnya, hanya saja kurikulum PAI dalam KBK ini terdapat muatan yang menekankan aspek toleransi antarumat beragama. Hal ini untuk menyikapi tragedi Poso dan Ambon agar tidak terjadi lagi (Sutrisno, 2004).

7. Kurikulum KTSP

Kurangnya keterampilan guru melaksanakan pembelajaran yang mendidik terkait erat dengan kebiasaan yang sudah lama melekat dalam sistem sentralisasi Pendidikan yaitu pembelajaran yang menekankan pada pencapaian target materi dan ranah kognitif (menghafal). Padahal sesungguhnya pembelajaran PAI menuntut porsi yang lebih besar pada aspek afektif.

8. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 pada dasarnya sudah cukup memuat kebutuhan para peserta didik, akan tetapi masih banyak yang masih belum terakomodir di antaranya yaitu minat siswa yang belum bisa semuanya dikabulkan dan dilaksanakan pada kurikulum 2013. Selain itu, problem yang muncul di antaranya yaitu keahlian para pendidik yang belum sepenuhnya menguasai IPTEK dan Media Pembelajaran, sehingga pembelajaran masih belum maksimal dilaksanakan. Untuk pendidikan agama Islam, pada kurikulum ini pendidikan agama (termasuk PAI) menempati prioritas utama daripada mata pelajaran lainnya. Namun, tantangannya adalah pada masa ini munculnya paham-paham keagamaan yang beragam dan paham keagamaan garis keras. Tantangan lainnya adalah kesiapan dari tenaga pendidik, sarana, laboratorium, dan fasilitas teknologi informasi (Nata, 2022).

9. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka baru-baru ini diluncurkan oleh dunia Pendidikan di Indonesia, Kurikulum ini masih dalam masa percobaan. Akan tetapi, lagi-lagi yang menjadi problem kita hari ini yaitu sarana dan prasarana di setiap Lembaga pendidikan belum mampu mengakomodir apa yang diinginkan oleh kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mendesain rencana pembelajaran karena kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk menerapkan metode yang tepat. Misalnya, materi mengenai salat berjamaah dapat dijadikan media untuk membentuk kedisiplinan para peserta didik. Salah satu tantangannya adalah proses evaluasi hasil belajar yang masih mengedepankan aspek kognitif. Selain itu, diperlukan pula kreatifitas pendidik. Tanpa kreatifitas, pembelajaran PAI akan menjadi ranah teoretis belaka (Paputungan, 2022).

KESIMPULAN

Secara historis, pendidikan Islam masih banyak diselenggarakan oleh institusi masjid maupun pesantren. Kurikulum PAI mengikuti perkembangan dari kurikulum pendidikan nasional. Perodesasinya antara lain: Kurikulum PAI pada masa prakemerdekaan, Kurikulum PAI pada masa orde lama (Kurikulum 1947 dan Kurikulum 1952-1964), Kurikulum PAI pada masa orde baru (Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, dan Suplemen 1999). Kurikulum PAI pada masa reformasi yang terdiri dari Kurikulum KBK, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau kurikulum 2006, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka.

Permasalahan kurikulum PAI yang pernah terjadi di Indonesia sebagai berikut: Kurikulum 1947 yakni kurikulum ini tidak mengajarkan tentang pendidikan umum maupun pendidikan Islam hanya saja kurikulum ini mengedepankan manusia yang cinta negara dan mempunyai kesadaran berbangsa). Selanjutnya, Kurikulum 1952-1964, Kurikulum ini banyak mendapat tantangan dari kaum pendidik, karena mereka memandang lebih tepat menggunakan sistem pendidikan Pancasila. Oleh karena itu, kurikulum ini tidak dapat digunakan lagi. Adapun Kurikulum 1975, Kurikulum ini banyak dikritik karena guru sibuk menulis mengenai rincian hal-hal apa saja yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.

Kurikulum 1984 menghadapi menghadapi kendala yakni banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Fenomena yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas, lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar dan guru tidak lagi mengajar dengan metode ceramah sehingga penolakan CBSA bermunculan. Kemudian, Kurikulum 1994 dan suplemen 1999 menghadapi kritik yang cukup besar yang disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat yaitu dari muatan nasional hingga muatan lokal. Dengan kehadiran suplemen kurikulum 1999, membuat perubahan yaitu menambah sejumlah materi. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak.

Kurikulum KBK mengalami problem yakni kurikulum ini membutuhkan banyak biaya, waktu, tenaga pendidik, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap di setiap sekolah karena kurikulum ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan berbasis kompetensi. Adapun Kurikulum KTSP tantangannya antara lain kurangnya keterampilan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan inovatif terkait erat dengan kebiasaan yang sudah lama dilaksanakan dalam sistem sentralisasi pendidikan yaitu pembelajaran yang menekankan pada pencapaian target materi dan ranah kognitif (menghafal). Padahal sesungguhnya pembelajaran PAI menuntut porsi yang lebih besar pada aspek afektif. Hal tersebut dibuktikan pada kualitas para siswa yang hanya bisa menghafal tetapi belum bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Para siswa hanya dapat memahami materi dalam tataran teoretis semata dan belum dapat meresapi maknanya. Sedangkan dalam Kurikulum 2013, kendalanya antara lain masih kurangnya keterampilan para pendidik dalam

menggunakan IPTEK dan media pembelajaran yang ada. Adapun problem yang dialami Kurikulum Merdeka adalah minimnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di dalam maupun di luar kelas.

Perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan kurikulum nasional dan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Beberapa penyesuaian dan dinamika yang terjadi dalam kurikulum PAI antara lain adanya perubahan porsi dari 25% menjadi 30% (70% pelajaran umum), penekanan pada aspek toleransi antarumat beragama pada kurikulum KBK tahun 2004, PAI menempati prioritas utama daripada mata pelajaran lainnya pada Kurikulum 2013. Namun, tantangannya adalah munculnya paham-paham keagamaan yang beragam, kurangnya kesiapan dari tenaga pendidik, sarana, laboratorium, dan fasilitas teknologi informasi. Adapun Kurikulum Merdeka memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mendesain rencana pembelajaran karena kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk menerapkan metode yang tepat. Namun, tantangannya adalah diperlukan kreatifitas yang tinggi dari pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Akhyar, A., & Erihadiana, M. (2021). UPAYA GURU DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 1 KERINCI. *Ta dib Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 353–360. doi: 10.29313/tjpi.v10i2.7582
- Azizah, R. (2022). Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Implementasi Pembelajaran PAI Siswa Madrasah Diniyah Nurul Huda Pasuruan. *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(01), 01–15. doi: 10.26618/jtw.v7i01.4742
- Bahri, S. (2011). PENGEMBANGAN KURIKULUM DASAR DAN TUJUANNYA. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15–34. doi: DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v11i1.61>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). London: SAGE Publications, Inc. Retrieved from <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Dhaifi, A. (2017). Perkembangan Kurikulum PAI di Indonesia. *Jurnal Edureligia*, 1(1), 76–88.
- Idi, A. (2014). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Iman, A. (2018). KURIKULUM SEBAGAI PEDOMAN PROGRAM DAN PROSES PEMBELAJARAN. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 1(1). Retrieved from <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/5266>
- Kemenag RI. (2021). SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DAN ORGANISASI DITJEN PENDIDIKAN ISLAM. Retrieved December 25, 2022, from Dirjen Pendis Kemenag RI website: <https://pendis.kemenag.go.id/profil/sejarah>
- Kodir, A. (2015). *Sejarah Pendidikan Islam dari Masa Rasulullah hingga Reformasi di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhaimin. (2007). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammedi, M. (2016). PERUBAHAN KURIKULUM DI INDONESIA: STUDI KRITIS TENTANG UPAYA MENEMUKAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM YANG IDEAL. *JURNAL RAUDHAH*, 4(1), 49–70. doi: 10.30829/raudhah.v4i1.61
- Nata, A. (2022). FENOMENA DAN DINAMIKA PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN DI SEKOLAH DAN MADRASAH DALAM KONTEKS KURIKULUM 2013. Retrieved December 25, 2022, from <http://abuddin.lec.uinjkt.ac.id/articles/fenomena-dan-dinamika-pendidikan-agama-dan-keagamaan-di-sekolah-dan-madrasah-dalam-konteks-kurikulum-2013>

- Novrizal, & Faujih, A. (2022). SEJARAH PESANTREN DAN TRADISI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *AL Fikrah : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 1–13.
- Paputungan, S. (2022). Pendidikan Islam dan Tantangan Merdeka Belajar. Retrieved December 25, 2022, from MTsN1GO website: <https://mtsn1go.sch.id/portal/pendidikan-islam-dan-tantangan-merdeka-belajar>
- Ritonga, M. (2018). POLITIK DAN DINAMIKA KEBIJAKAN PERUBAHAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI INDONESIA HINGGA MASA REFORMASI. *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2), 88–102.
- Setiawati, F. (2022). Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum terhadap Pembelajaran di Sekolah. *NIZĀMUL`ILMI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 1–17. doi: 10.1042/nizamulilmi.v7i1.124
- Sudjana, N. (2011). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukino, A. (2016). KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF DALAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN MADRASAH BERORIENTASI MUTU. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 81–100. doi: 10.33507/an-nidzam.v3i1.10
- Sukino, A. (2017). PENGEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH DI DAERAH TRANSISI. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 3(01), 24–42. doi: 10.32678/tarbawi.v3i01.1777
- Sukino, A., & Erwin, E. (2019). ADAPTASI MADRASAH DI DAERAH RENTAN KONFLIK SOSIAL. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(2), 259–277. doi: 10.22373/jiif.v19i2.4905
- Sutrisno. (2004). PROBLEMATIKA PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK) MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 69–80.
- Tafsir, A. (2005). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.